

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BUNGO

SIRAJUDIN AL-AKSARI*)

*) Alumni Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bungo. tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah serta Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan instrument penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bungo Periode 2003 – 2013 rata-rata 8,6 persen pertahunnya, dengan perkembangan nilai terbesar pada tahun 2008 yaitu sebesar 11, 86 persen dan perkembangan terkecil terjadi pada tahun 2006 sebesar 6,98 persen. (2) Nilai tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bungo periode 2003 – 2013 rata-rata sebesar 11,12 persen pertahunnya dengan tingkat kemandirian terbesar pada tahun 2013 sebesar 31,75 persen dan tingkat kemandirian terkecil terjadi pada tahun 2009 sebesar 7,07 persen. (3) Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo sebesar 7,6 persen dan sisanya sebesar 92,4 persen dipengaruhi variabel lain, angka ini menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal sangat berpengaruh kuat terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Latar Belakang

Sampai saat ini, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan isu yang tetap menarik untuk didiskusikan karna dari berbagai studi yang pernah dilakukan memang terdapat ambiguitas hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, beberapa penelitian yang dilakukan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dengan menggunakan model analisis ekonometrika, juga menghasilkan simpulan yang berbeda. Disatu pihak, hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana hasil penelitian wibowo (2008), dan Waluyo (2007). Sementara hasil penelitian Swasno (2007) berkesimpulan sebaliknya, bahwa desentralisasi fiskal justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia awal era baru desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dimuali dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk menyeimbangan semuanya pada tahun 2004 dikeluarkan undang undang otonomi daerah yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang- Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mengikuti fenomena yang terjadi secara nasional, implementasi desentralisasi di Provinsi Jambi juga ditandai dengan euforia pemekaran wilayah. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang merespon dengan cepat terbitnya Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999 dan merupakan salah satu provinsi yang melakukan pemekaran wilayah dalam jumlah yang relatif cukup signifikan, dimana hampir seluruh Kabupaten di Provinsi Jambi dilakukan pemekaran wilayah. Sehingga kabupaten/kota yang sebelumnya hanya berjumlah enam kabupaten/kota, berkembang menjadi sebelas Kabupaten/kota karena adanya pemekaran wilayah atau pembentukan empat Daerah Otonom Baru (DOB).

Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal, terdapat fenomena menarik dari perekonomian daerah di Provinsi Jambi yaitu kondisi makro ekonomi daerah dari perekonomian daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi pasca pelaksanaan desentralisasi fiskal yang menunjukkan gejala yang relatif baik jika dibandingkan dengan era sebelum desentralisasi fiskal. Terdapat beberapa indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah, salah satunya dilihat dari pertumbuhan output perekonomian daerah yang tercermin dari Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) riil.

Beranjak dari hal tersebut dengan melihat Perkembangan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo selama tiga tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan beragam. Perkembangan ini dapat kita lihat melalui angka perkembangan PDRB Kabupaten Bungo pada tahun 2010 - 2012 menunjukkan peningkatan yang berarti. Pada Tahun 2010 PDRB Kabupaten Bungo dengan pertambahan non migas atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 4.033,29 Triliun, angka ini terus berkembang dari tahun ke tahun, pada tahun 2011 mencapai Rp 4.755 Triliun, dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 5.446 Triliun, bila dibandingkan dengan tahun 2000 terjadi perkembangan yang cukup besar yaitu 796,15 persen.

Jika dilihat dari harga konstan 2000 PDRB dengan pertambahan non migas yang dihasilkan Kabupaten Bungo pada tahun 2012 mencapai Rp 1,492 Triliun, ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Bungo mengalami perkembangan PDRB sebesar 217,43 persen dibandingkan tahun dasar 2000.

Sedangkan dilihat dari perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Bungo adalah Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Bungo juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 pendapatan per-kapita masyarakat sebesar Rp. 10.150.118,48 per tahun, meningkat menjadi Rp.14.056.769,93 pada tahun 2011.

Permasalahan

1. Bagaimanakah perkembangan derajat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian pembiayaan di Kabupaten Bungo ?
2. Bagaimanakah Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah di Kabupaten Bungo ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis derajat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandiraian pembiayaan di Kabupaten Bungo ?
2. Untuk menganalisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bungo ?

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan antara data Time Series dengan data Cross Section, dan merupakan data sekunder yaitu data yang di peroleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan di publikasikan oleh instansi tertentu. Data yang di gunakan dalam penelitian ini mencakup periode 10 Tahun dari tahun 2002 sampai dengan 2013 dan dilengkapi dengan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo tahun 2002 – 2013 serta Data jumlah Penduduk tahun 2002 – 2013.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bungo dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bungo. Selain itu data yang di gunakan dalam penelitian ini di peroleh melalui akses Internet pada alamat web site/situs resmi antara lain <http://www.bps.go.id> , <http://depkeu.go.id> dan situs resmi pemerintah Kabupaten Bungo.

Metode Analisis

Metode analisis data yang di gunakan penulis ini adalah metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, yaitu dimana metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data dengan menjelaskan secara rinci tentang variabel yang diteliti. sedangkan metode analisis kuantitatif yaitu metode yang di gunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan cara perhitungan matematis dan angka-angka dalam rumus regresi yaitu :

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Kemandirian keungan daerah dapat di hitung dengan rumus Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dengan cara :

$$\text{DDF} : \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Selain itu untuk melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dengan cara :

$$\text{Kemandirian Pembiayaan} : \frac{\text{PAD}}{\text{Pengeluaran Daerah}} \times 100 \% \text{ Total}$$

b. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bungo di hitung dengan menggunakan rumus Regresi Linear Sederhana dengan cara :

$$Y = \alpha + \beta x$$

Keterangan :

- y : Pertumbuhan Ekonomi
- a : Konstanta
- b : Koefisien
- x : Derajat Desentralisasi Fiskal

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Derajat Desentralisasi Fiskal

Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri hal ini menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Jika kinerja keuangan daerah positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung otonomi daerah. Nilai derjat desentralisasi fiskal Kabupaten Bungo dari tahun 2003 – 2013 rata – rata mengalami peningkatan yaitu sebesar 8,76%. Dimana dapat dilihat pada tahun 2003 nilai derajat desentralisasi fiskal sebesar 9,87% sampai dengan tahun 2008 nilai derajat desentralisasi fiskal meningkat menjadi 11,86%, kemudian di tahun 2009 turun menjadi 7,95% dan nilai derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bungo mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 8,55% sampai dengan tahun 2013 nilai derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bungo sebesar 8,34 %. Untuk melihat perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bungo tahun 2003 – 2013

Tahun	PAD	Realisasi	PERSEN	DDF
2003	24.244.639.219,45	245.488.039.000,00	100	9,87
2004	20.821.712.380,00	218.180.952.069,48	100	9,54
2005	22.244.318.392,39	254.177.954.980,69	100	8,75
2006	28.309.714.851,50	405.565.813.893,98	100	6,98
2007	43.662.550.407,22	483.396.998.965,82	100	9,03
2008	64.305.804.619,84	542.131.780.688,24	100	11,86
2009	41.391.113.660,23	520.412.279.564,53	100	7,95
2010	45.863.785.900,70	620.682.985.437,70	100	7,38
2011	60.708.028.070,85	709.887.708.272,21	100	8,55
2012	64.281.003.297,73	789.651.726.079,32	100	8,14
2013	78.393.003.426,86	939.675.234.575,81	100	8,34
Rata – Rata				8,76

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bungo 2014

Tingkat Kemandirian Daerah

Semakin tinggi tingkat derajat kemandirian daerah suatu daerah maka semakin mampu pula daerah dalam membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bungo dari tahun 2003 – 2013 rata – rata mengalami peningkatan sebesar 11,12%, Dimana pada tahun 2003 nilai tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bungo sebesar 9,87%, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi sebesar 10,69%, namun peningkatan angka tingkat kemandirian daerah ini tidak bertahan cukup lama sehingga pada tahun 2009 menjadi sebesar 7,07% dan kembali meningkat pada tahun 2011

menjadi sebesar 9,07 %. Dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bungo sangat dirasakan pada tahun 2013 dimana angka kemandirian daerah sebesar 31,75%. Melihat perkembangan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bungo tahun 2003 – 2013 sangat berfluktuasi dan bergelombang seperti tabel dan gambar berikut :

Tabel 2. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Bungo tahun 2003 – 2013

Tahun	PAD	Total Pengeluaran	%	T. Kemandirian
2003	24.244.639.219,45	245.488.039.000,00	100	9,87
2004	20.821.712.380,00	210.895.003.811,69	100	9,87
2005	22.244.318.392,39	232.332.699.675,03	100	9,57
2006	28.309.714.851,50	326.354.045.060,71	100	8,67
2007	43.662.550.407,22	448.683.563.560,88	100	9,73
2008	64.305.804.619,84	601.546.286.435,61	100	10,69
2009	41.391.113.660,23	585.080.011.616,07	100	7,07
2010	45.863.785.900,70	619.036.981.080,00	100	7,40
2011	60.708.028.070,85	668.896.142.202,00	100	9,07
2012	64.281.003.297,73	747.090.461.399,00	100	8,60
2013	78.393.003.426,86	246.894.932.407,34	100	31,75
Average				11,12

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bungo 2014

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan target bagi setiap negara di dunia. Pertumbuhan Ekonomi selalu menjadi faktor yang paling penting dalam keberhasilan perekonomian suatu daerah untuk jangka panjang, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo dapat dilihat melalui PDRB Rill atas dasar harga Konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Bungo tahun 2003 – 2012 sangatlah berfluktuasi dan meningkat. Dimana rata – rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo tahun 2003 – 2012 sebesar 7,31%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bungo Tahun 2003 – 2012.

Tahun	PDRB	PDRBt-1	PDRBt - PDRBt-1	%	PE
2003	800.953,00	738.459,00	62.494,00	100	8,46
2004	814.044,04	800.953,00	13.091,04	100	1,63
2005	856.818,36	814.044,04	42.774,32	100	5,25
2006	939.040,98	856.818,36	82.222,62	100	9,59
2007	1.021.691,10	939.040,98	82.650,12	100	8,80
2008	1.135.381,09	1.021.691,10	113.689,99	100	11,12
2009	1.208.036,66	1.135.381,09	72.655,57	100	6,39
2010	1.289.286,47	1.208.036,66	81.249,81	100	6,72
2011	1.388.315,58	1.289.286,47	99.029,11	100	7,68
2012	1.492.587,35	1.388.315,58	104.271,77	100	7,51
Rata – Rata					7,31

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bungo 2014

Jika dilihat dari angka Pertumbuhan Ekonomi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil menurut harga berlaku berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Bungo tahun 2003 – 2012. Terlihat bahwa terjadi fluktuasi yang sangat baik dimana pertumbuhan ekonomi kabupaten bungo rata-rata mengalami perkembangan sebesar 19,00 % pertahunnya dapat dilihat pada tahun 2003 sebesar 13,58 % dan meningkat pada tahun 2004 sebesar 26,91 %. Namun terjadi penurunan nilai pertumbuhan ekonomi di tahun 2005 sebesar 14,87 % hal ini disebabkan karena penurunan nilai angka realisasi PDRB Kabupaten Bungo sehingga Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan angka, penurunan ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2006 meningkat sebesar 19,80 % sampai dengan tahun 2008 sebesar 32,16 %. Kemudian di tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 angka pertumbuhan ekonomi relatif stabil. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4. PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bungo Tahun 2003 – 2012.

TAHUN	PDRB	PDRBT-1	PDRB - PDRBT-1	PERSEN (%)	PE
2002	914.916,00	800.955,00	113.961,00	100	14,22
2003	1.039.234,01	914.916,00	124.318,01	100	13,58
2004	1.318.981,75	1.039.234,01	279.747,74	100	26,91
2005	1.515.121,03	1.318.981,75	196.139,28	100	14,87
2006	1.746.565	1.515.121,03	231.443,97	100	15,27
2007	1.991.299,00	1.746.565	244.734,00	100	14,01
2008	2.320.619,00	1.991.299,00	329.320,00	100	16,53
2009	2.630.522,00	2.320.619,00	309.903,00	100	13,35
2010	4.033.988,20	2.630.522,00	1.403.466,20	100	53,35
2011	4.755.294,29	4.033.988,20	721.306,09	100	17,88
2012	5.446.199,34	4.755.294,29	690.905,05	100	14,52
Average					19,50

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bungo 2014

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Desentralisasi Fiskal yang diterapkan oleh Kabupaten Bungo memberikan pengaruh yang kuat dan positif mendorong pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten bungo. Kesimpulan ini dapat dibuktikan secara empiris, yaitu dapat dilihat dari perhitungan regresi linear sederhana menggunakan Program SPSS 16.

Dari perhitungan Regresi linear sederhana tersebut hubungan dari derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi sangat positif. Dari perhitungan diperoleh nilai Regresi linear sebesar 0,076 (Perhitungan Terlampir), hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang kuat dari penerapan desentralisasi fiskal di kabupaten Bungo terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7,6 % sedangkan sisanya 92,4 % dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan tabel Coefficient Regresi linear berikut :

Tabel 5. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2002 – 2012

Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Betta		
1 (Constant)	5.717	1.277		4.447	.002
Pertubuhan Ekonomi	.131	.064	.584	2.037	.076

a. Devendent Variabel : Desentralisasi Fiskal

Keterangan Penjelasan :

$$Y = a + bx$$

Dari tabel diatas maka di ketahui :

$$\alpha = 5.717 \quad \beta = 0,584 \quad t_{hitung} = 0,076$$

Maka diperoleh persamaan Regresi Linear sederhananyanya adalah :

$$Y = 5.717 + 0,584 x$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan nilai persamaan regresi linear sederhana tersebut di dapat bahwa dimana ketika Pertumbuhan Ekonomi meningkat sebesar 5.717 % akan meningkatkan Desentralisasi Fiskal sebesar 0,584 %. Dengan demikian persamaan regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan desentralisasi fiskal. Untuk lebih jelas melihat tingkat signifikan angka regresi (0,584) bisa di gunakan uji t sebagai berikut :

Hipotesis signifikan regresi berdasarkan uji t : $H_a : P_{yX} \neq 0$

$H_o : P_{yX} = 0$

- H_a : Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
 - H_o : Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan, sebaliknya jika nilai t hitung lebih kecil dari pada t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.*

$$t_{hitung} : 2,037$$

$$t_{tabel} : 1,82$$

$$2,037 \geq 1,82$$

Keterangan T tabel di dapat dari tabel t-student untuk melihat nilai 0,05 / derajat bebas dari tabel bantu statistik.

Ini berarti menunjukkan bahwa H_o di tolak dan H_a diterima, artinya hubungan ini sangat signifikan jadi Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kesimpulan

1. Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal selama 10 tahun periode Kabupaten Bungo dari tahun 2003 – 2013 rata – rata mengalami peningkatan sebesar 8,76 %. Fluktuasi nilai Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bungo sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dalam mengembangkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bungo.
2. Nilai Tingkat Kemandirian Daerah selama 10 tahun Kabupaten Bungo dari tahun 2003 – 2013 mengalami peningkatan tiap tahunnya rata –rata sebesar 11,12 %. Dengan demikian Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Bungo sangat menentukan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Pertumbuhan Ekonomi yang dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rill atas harga konstan Kabupaten Bungo dari tahun 2003 – 2012 rata - rata meningkat sebesar 7,31 % . peningkatan PDRB Rill ini menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik terhadap pemanfaatan pengelolaan keuangan dan perkembangan pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Bungo.
4. Pengaruh desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo mencapai angka 7,6 % , angka ini menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal sangat berpengaruh kuat dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo, sedangkan sisanya 92,4 % dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bungo diharapkan kedepannya akan lebih memanfaatkan potensi – potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan begitu pemerintah dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya menggunakan Pendapatan Asli Daerah tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah Kabupaten Bungo dapat meningkatkan Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal agar lebih berkontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo.
2. Peningkatan kebijakan Desentralisasi Fiskal sebaiknya lebih ditingkatkan lagi supaya semua kebutuhan publik dapat terpenuhi sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dan tugas pemerintah Kabupaten Bungo, selain itu agar perekonomian Kabupaten Bungo akan semakin baik lagi serta memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Akai, Nobuo, & Sakata, Masayo. (2002) Fiscal Decentralization Contributes To Economic Growth : Evidence From State-Level Cross-Section Data For The United States. *Journal Of Urban Economics* 52 (2002) 93-108.
- Anonim, Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Anonim, Undang-undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

- Anonim, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Anonim, Undang-undang No. 33 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Desentralisasi.
- Arsyad, Lincolin, 1999, *Ekonomi Daerah, Pengantar Perencanaan Pembangunan*, BPEE, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin, 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5. Yogyakarta : STIM Bachtiar, Nurzaman, 1992, *Otonomi dan Implikasinya Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah, Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Volume IV No.1 dan 2, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Badan Pusat Statistik. *Bungo dalam Angka berbagai tahun*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Bungo.
- Badan Pusat Statistik. *PDRB Kabupaten Muaro Bungo berbagai tahun*. Badan Pusat Statistik Muaro Bungo.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi 1. Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada.
- Davoodi, H., & Zou, Heng-Fu. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth : A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, 43:244-57.
- Desai, R.M., Freinkman, L.M., & Godberg, I. (2003). Fiscal Federalisme and Regional Growth Evidence from Russian Federation in the 1990s. *World Bank Policy Research Working Paper 3138*, World Bank, Washington DC.
- Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Data Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo*. Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Muaro Bungo.
- Halim, Abdul, 2001, *Manajemen Keuangan Daerah, "Bunga Rampai"*, UPP AMP YKPN, Edisi Pertama, Yogyakarta.
- Hariyanto, Dedy, 2012. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Provinsi Jambi*. Tesis. Jambi.
- Nurjuniati, 2013. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dikabupaten Sarolangun*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jambi.
- Swasno, Fauziah. (2007). Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence From Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, Vol.55(2).
- Thiessen, Ulrich. (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Countries. *Fiscal Studies* Vol. 24 No 3.
- Waluyo, Joko. (2007). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : Penerbit EKONISIA.
- Wibowo, Puji. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Journal Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2008.
- Woller, M. Garry, & Phillips Kerk (1998). Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth ; An Empirical Investigation. *The Journal of Development Studies*; Vol.34 (4).
- Xie, D., Zou, H., & Davoodi, H. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States. *Journal of Urban Economics*, 45:228-239.
- Zhang Taao, & Zou Heng-Fu, 1998, Fiscal Decentralization. Public Spending and Economic Growth in China. *Journal of Public Expenditure*, 67 : 221-240.